

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang dalam tahap berkembang. Dalam tahap tersebut, tentunya negara membutuhkan sangat banyak pemasukan negara yang akan digunakan sebagai sumber pembangunan negara. Terdapat banyak sumber pendapatan suatu negara, mulai dari pendapatan yang berasal dari kekayaan negara sampai dengan yang berasal dari masyarakatnya. Salah satu pendapatan negara yang berasal dari masyarakat adalah dari sektor pendapatan pajak. Pajak merupakan dana yang berasal dari rakyat yang dibayarkan ke pemerintah tanpa imbalan apapun untuk memfasilitasi dan mendukung proses pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur negara demi kepentingan seluruh rakyat. Pembangunan negara akan semakin baik jika pendapatan yang didapatkan juga semakin banyak.

Kontribusi Pemerintah Daerah juga diperlukan dalam mendukung pembangunan negara. Untuk mendukung pembangunan tersebut, maka pemerintah perlu menggali berbagai sumber pendapatan daerah. Terdapat berbagai macam sumber pendapatan daerah yang ada di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu

sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:

1. hasil pajak daerah
 2. hasil retribusi daerah
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 4. lain – lain PAD yang sah
- b. Dana perimbangan.
- c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kota/Kabupaten. Pajak Daerah Provinsi terdiri dari: 1) Pajak Kendaraan Bermotor, 2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, 5) Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Daerah Kota/Kabupaten yaitu: 1) Pajak Hotel, 2) Pajak Restoran, 3) Pajak Hiburan, 4) Pajak Reklame, 5) Pajak Penerangan Jalan, 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bukan Batuan, dan 7) Pajak Parkir, 8) Pajak Air Tanah, 9) Pajak Sarang Burung Walet, 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Guna mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah, pemerintah daerah harus dapat menggali sumber pendapatan daerah secara optimal dari berbagai bidang namun tetap dalam batasan undang – undang yang berlaku. Jika dilihat dari banyaknya sumber pendapatan daerah, sumber – sumber pendapatan daerah yang paling potensial berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak kendaraan bermotor merupakan perolehan pajak daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan yang memiliki kontribusi penting terhadap

pembangunan daerah, selain itu pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang diberikan kepada pemilik atau penguasa kendaraan bermotor. Perolehan pajak kendaraan bermotor tiap tahun selalu mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi yang mempengaruhi masyarakat untuk hidup lebih efisien dan ekonomis dalam memenuhi kebutuhannya. Kendaraan bermotor merupakan salah satu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan, hampir setiap individu memiliki satu atau lebih kendaraan bermotor. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena kendaraan bermotor sangat membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Peningkatan permintaan kendaraan bermotor juga menyebabkan peningkatan terhadap jumlah Wajib Pajak kendaraan bermotor. (Kemala, 2015) mengatakan bahwa jumlah atas Wajib Pajak yang terus meningkat disebabkan karena perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat secara terus menerus.

Peningkatan kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor memberikan dampak positif terhadap pemerintah daerah, karena pajak kendaraan bermotor yang meningkat diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah. Namun pada kenyataannya, saat ini masih banyak Wajib Pajak yang lupa dan tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan sifat sadar seseorang atau badan bahwa pihaknya memiliki kewajiban yang harus dilakukan dalam bentuk membayar dan menaati aturan pajak yang berlaku. Peningkatan penerimaan pajak dipengaruhi oleh besarnya jumlah Wajib Pajak yang telah patuh.

Terdapat beberapa faktor yang diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi Pajak merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak karena dengan adanya sosialisasi perpajakan, diharapkan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak mengenai aturan perpajakan yang sedang berlaku semakin baik. Penyuluhan langsung merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk menginformasikan betapa pentingnya patuh terhadap pajak.

Sosialisasi pajak dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh petugas pajak. Pemberian informasi perpajakan yang diberikan oleh petugas pelayanan dapat menentukan seberapa besar tingkat kualitas pelayanan yang ada pada kantor SAMSAT tersebut. Semakin baik petugas dalam melayani dan memberikan informasi perpajakan kepada para Wajib Pajak, maka dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan telah baik. Wajib Pajak akan meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya jika mendapatkan kualitas pelayanan yang baik (Pranata dan Setiawan, 2015).

Pemenuhan kewajiban perpajakan tidak terlepas dari salah satu faktor berikut, yaitu biaya kepatuhan. Biaya kepatuhan adalah semua biaya yang ditanggung oleh wajib pajak sebagai pemenuhan kewajiban pajak. Kesadaran Wajib Pajak juga termasuk dalam faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sikap dari wajib pajak yang telah paham tentang pajak dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku merupakan pengertian dari kesadaran wajib pajak.

Beberapa faktor yang telah disebutkan di atas akan lebih berpengaruh jika diiringi dengan adanya sanksi pajak yang digunakan sebagai alat untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap perpajakan. Terdapat dua sanksi yang diberlakukan yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Wajib pajak adalah orang atau badan yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Dalam penelitian ini, wajib pajak yang dimaksud adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Daerah Kabupaten Wonosobo. Jika wajib pajak tidak tepat waktu atau bahkan tidak bersedia membayar pajak, maka akan dikenakan sanksi. Tidak hanya wajib pajak, pegawai pelayanan juga akan dikenakan sanksi jika mereka tidak dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap wajib pajak.

Seorang wajib pajak yang baik, maka harus mempunyai kesadaran akan melaksanakan kewajibannya dengan baik pula. Dalam hal ini, tentu wajib pajak harus dengan suka rela tanpa perlu paksaan, setiap tahunnya harus membayar pajak yang telah menjadi kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik. Berbagai faktor di atas seperti sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, biaya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dilakukan agar dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Wonosobo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah spesifik dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah variabel sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?
2. Apakah variabel kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajka dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?
3. Apakah variabel biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor ?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor ?
5. Apakah sanksi pajak memoderasi hubungan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?
6. Apakah sanksi pajak memoderasi hubungan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan pokok yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menginvestigasi dan menemukan bukti empiris mengenai adanya pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Menginvestigasi dan menemukan bukti empiris mengenai adanya pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Menginvestigasi dan menemukan bukti empiris mengenai adanya pengaruh biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Menginvestigasi dan menemukan bukti empiris mengenai adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
5. Menginvestigasi dan menemukan bukti empiris pengaruh moderasi sanksi pajak terhadap hubungan sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
6. Menginvestigasi dan menemukan bukti empiris pengaruh moderasi sanksi pajak terhadap hubungan kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi Kantor Samsat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pegawai samsat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih baik tentang aturan perpajakan kepada wajib pajak.

3. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi Strata1 (S1) di Fakultas Ekonomi UII dan memperluas pengetahuan perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab pembahasan ditambah dengan lampiran-lampiran dan daftar pustaka.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang dilanjutkan dengan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang populasi dan sampel, jenis penelitian, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, serta model dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan pembahasan hasil penelitian, serta pengujian dan analisis hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang mungkin dapat diajukan dan dilaksanakan untuk penelitian selanjutnya.

